

STRATEGI BPBD BENGKULU MENANGGULANGI GEMPA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYYAH

Tommy Indrabhakti¹

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Tommyindrabbhakti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam penanggulangan gempa bumi serta menganalisis implementasinya dalam perspektif siyasah tanfiziyyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat kerawanan gempa bumi di Kota Bengkulu yang berada pada zona subduksi Lempeng Indo-Australia dan jalur Sesar Semangko sehingga diperlukan strategi penanggulangan bencana yang efektif dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Bengkulu telah menerapkan strategi penanggulangan bencana secara komprehensif melalui tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Tahap prabencana dilakukan melalui mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penyusunan jalur evakuasi, simulasi kebencanaan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Tahap tanggap darurat dilaksanakan melalui aktivasi sistem komando, evakuasi korban, distribusi logistik, dan mobilisasi sumber daya secara cepat. Tahap pascabencana difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemberian bantuan stimulan sesuai tingkat kerusakan. Dalam perspektif siyasah tanfiziyyah, strategi tersebut mencerminkan pelaksanaan prinsip amanah, syura, keadilan, dan kemaslahatan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi jiwa, harta, dan keselamatan masyarakat.

Kata Kunci: BPBD, Penanggulangan Gempa Bumi, Siyasah Tanfiziyyah.

PENDAHULUAN

Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang memiliki tingkat risiko tinggi di Indonesia, terutama pada wilayah yang berada di sepanjang pertemuan lempeng tektonik aktif. Kota Bengkulu termasuk daerah dengan tingkat kerawanan gempa yang tinggi karena terletak di kawasan subduksi Lempeng Indo-Australia dan dipengaruhi oleh aktivitas Sesar Semangko. Kondisi geologis tersebut menyebabkan wilayah ini berpotensi mengalami gempa bumi berkekuatan besar yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Karakteristik tersebut menuntut tersedianya sistem penanggulangan bencana yang mampu mengurangi risiko, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat (Alfarabi & Adhrianti, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan secara reaktif setelah bencana terjadi, tetapi memerlukan perencanaan yang terintegrasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan, kesiapan sumber daya, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem pengurangan risiko bencana (Safitra et al., 2023).

Perubahan paradigma penanggulangan bencana di Indonesia menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada penanganan pascabencana menuju pengelolaan risiko bencana secara menyeluruh. Paradigma tersebut memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana secara terpadu. Pendekatan tersebut menempatkan mitigasi, kesiapsiagaan, respons darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan untuk mengurangi dampak bencana sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman kebencanaan (Firmansyah & Arwani, 2013).

Perubahan paradigma tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari kemampuan merespons keadaan darurat, tetapi juga dari efektivitas kebijakan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menekan potensi kerugian yang ditimbulkan ketika bencana terjadi.

Peristiwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,3 yang terjadi pada 23 Mei 2025 di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa ancaman kebencanaan masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Gempa tersebut mengakibatkan kerusakan pada 206 unit rumah, termasuk delapan rumah dengan kategori rusak berat, serta enam fasilitas umum yang tersebar di Kecamatan Selebar, Gading Cempaka, Singaran Pati, Sungai Serut, dan Kampung Melayu. Besarnya dampak yang ditimbulkan menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari kecepatan penanganan saat keadaan darurat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat sebelum bencana serta mempercepat proses pemulihan setelah bencana terjadi (Setiawan & Handoyo, n.d.).

Peristiwa tersebut menjadi indikator penting bahwa wilayah dengan tingkat kerawanan gempa tinggi memerlukan strategi penanggulangan bencana yang adaptif, terukur, dan berkelanjutan agar risiko terhadap keselamatan masyarakat dapat diminimalkan secara efektif. Pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat pemerintah yang memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. BPBD dituntut mampu menyusun strategi yang adaptif terhadap karakteristik wilayah, mengoptimalkan koordinasi lintas sektor, serta mengintegrasikan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi agar risiko bencana dapat diminimalkan. Strategi yang diterapkan juga harus mampu menjamin efektivitas perlindungan masyarakat melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cepat, terukur, dan berkelanjutan (Putra & Rahmi, 2021).

Keberhasilan strategi tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, efektivitas koordinasi antarpemangku kepentingan, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan pemerintah dalam membangun sinergi dengan masyarakat pada setiap tahapan penanggulangan bencana. Dalam perspektif fiqh siyasah, penanggulangan bencana tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan amanah dalam menjaga kepentingan masyarakat. Konsep siyasah tanfiziyah menempatkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab mewujudkan

kemaslahatan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, adil, dan berpihak pada kepentingan publik. Pelaksanaan strategi penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD karena itu tidak hanya dapat dinilai dari aspek administratif, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip amanah, syura, keadilan, dan kemaslahatan sebagai nilai-nilai dasar dalam hukum Islam (Ariyanti & Susanti, 2025).

Pendekatan ini memberikan perspektif bahwa efektivitas kebijakan penanggulangan bencana tidak hanya diukur berdasarkan pencapaian administratif, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam penanggulangan gempa bumi serta mengkaji implementasinya dalam perspektif siyasah tanfiziyyah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam, khususnya pada bidang kebijakan publik dan penanggulangan bencana, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat strategi penanggulangan bencana di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan gempa tinggi (Safitri et al., 2023).

Selain memberikan kontribusi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada pengurangan risiko melalui penguatan tata kelola kelembagaan serta penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang selaras dengan nilai-nilai siyasah tanfiziyyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu untuk menganalisis strategi penanggulangan gempa bumi serta implementasinya dalam perspektif siyasah tanfiziyyah. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan kebencanaan, dan berbagai literatur yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengidentifikasi strategi BPBD pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif siyasah tanfiziyyah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip amanah, syura, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi BPBD Kota Bengkulu pada Tahap Prabencana

Strategi BPBD Kota Bengkulu pada tahap prabencana berorientasi pada penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai upaya utama dalam mengurangi risiko gempa bumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai program telah dilaksanakan melalui pengembangan Kelurahan Siap Siaga Bencana, penyusunan peta dan jalur evakuasi pada wilayah rawan,

pemasangan rambu evakuasi, penyediaan titik kumpul, identifikasi kelompok rentan, serta pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala. Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat juga menjadi bagian dari strategi mitigasi untuk membangun kesiapsiagaan yang lebih sistematis. Strategi tersebut menunjukkan bahwa BPBD tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana mitigasi, tetapi juga berupaya membangun kapasitas masyarakat agar memiliki kemampuan mengenali potensi ancaman, memahami prosedur penyelamatan, serta mampu mengambil tindakan secara cepat dan tepat ketika bencana terjadi (Fernalia et al., 2020).

Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas mitigasi sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah dalam mengintegrasikan aspek kelembagaan, edukasi, dan partisipasi masyarakat sehingga upaya pengurangan risiko bencana dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan bahwa mitigasi bencana memerlukan kolaborasi lintas sektor sebagai prasyarat terciptanya sistem penanggulangan bencana yang efektif (Susmita et al., 2023).

Implementasi strategi tersebut menunjukkan bahwa BPBD Kota Bengkulu telah menjalankan fungsi mitigasi sesuai arah kebijakan nasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan latihan kebencanaan. Pendekatan tersebut mencerminkan perubahan paradigma penanggulangan bencana yang menempatkan pengurangan risiko sebagai prioritas dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi (Rahmawati, Ningsih, Sasmita, et al., 2025).

Pelaksanaan strategi prabencana masih menghadapi beberapa tantangan yang memengaruhi efektivitas implementasi. Penyebaran informasi kebencanaan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, sementara tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi masih bervariasi antarwilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya program, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengurangan risiko bencana.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesiapsiagaan memerlukan penguatan strategi komunikasi kebencanaan yang lebih inklusif, sehingga informasi dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi maupun mengikuti kegiatan mitigasi. Evaluasi terhadap efektivitas program juga menjadi penting agar setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana (Hamzah et al., 2020).

Dalam perspektif siyasah tanfiziyyah, strategi prabencana mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam mencegah terjadinya kemudharatan sebelum bencana menimbulkan dampak yang lebih luas. Kebijakan mitigasi merupakan bentuk implementasi amanah negara dalam melindungi keselamatan masyarakat sekaligus mewujudkan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas edukasi, perluasan partisipasi masyarakat, dan evaluasi program mitigasi secara berkelanjutan menjadi aspek penting untuk memperkuat efektivitas kebijakan pada tahap prabencana.

Prinsip tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berkewajiban memberikan perlindungan ketika bencana telah terjadi, tetapi juga harus memastikan terselenggaranya kebijakan yang mampu mencegah atau meminimalkan risiko sejak tahap prabencana. Dengan demikian, strategi mitigasi yang dilaksanakan BPBD Kota Bengkulu tidak hanya memiliki legitimasi berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai amanah, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintahan sebagaimana menjadi tujuan utama dalam siyasah tanfiziyyah.

Strategi BPBD Kota Bengkulu pada Tahap Tanggap Darurat

Strategi tanggap darurat dilaksanakan melalui aktivasi sistem komando segera setelah terjadi gempa bumi pada 23 Mei 2025. Penetapan status tanggap darurat menjadi dasar hukum bagi mobilisasi personel, distribusi logistik, pelaksanaan evakuasi korban, penyediaan pelayanan kesehatan, serta koordinasi lintas sektor dengan berbagai instansi terkait. Langkah tersebut menunjukkan bahwa respons BPBD tidak hanya diarahkan pada penanganan keadaan darurat, tetapi juga pada pemulihan kondisi masyarakat secara cepat dan terkoordinasi (Yuliani et al., 2024).

Pelaksanaan tanggap darurat memperlihatkan adanya integrasi fungsi antarinstansi dalam mendukung efektivitas penanganan bencana. Kaji cepat, pendataan kerusakan, distribusi bantuan, penyediaan hunian sementara, serta layanan psikososial dilaksanakan secara simultan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam mempercepat proses penanganan sekaligus mengurangi potensi risiko lanjutan akibat bencana. Efektivitas pelaksanaan tanggap darurat masih dipengaruhi oleh beberapa kendala operasional, terutama pada aspek koordinasi lapangan, distribusi logistik, dan keterbatasan sumber daya pada kondisi darurat. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan respons bencana tidak hanya ditentukan oleh kecepatan tindakan, tetapi juga oleh kesiapan sistem koordinasi, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan pengambilan keputusan secara adaptif pada situasi krisis (Fernalia et al., 2020).

Perspektif siyasah tanfiziyyah memandang tindakan pemerintah pada fase tanggap darurat sebagai bentuk pelaksanaan amanah dalam menjaga keselamatan masyarakat. Mobilisasi sumber daya, percepatan pelayanan, dan pengambilan kebijakan darurat mencerminkan orientasi pemerintahan yang mengutamakan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena diarahkan untuk meminimalkan dampak bencana dan mencegah kerugian yang lebih besar (Susmita et al., 2023).

Strategi BPBD Kota Bengkulu pada Tahap Pascabencana

Tahap pascabencana difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi guna memulihkan kehidupan masyarakat terdampak. Strategi yang diterapkan dilakukan melalui pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan, pemulihan fasilitas umum, serta penyusunan kebijakan teknis yang mendukung percepatan rehabilitasi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengembalian fungsi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat mampu kembali menjalankan aktivitas secara normal setelah terdampak bencana. Oleh karena itu, proses pemulihan tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dan lingkungan agar lebih tangguh dalam menghadapi potensi bencana pada masa mendatang (Sudarman & Dudi, 2026).

Pelaksanaan rehabilitasi memperlihatkan adanya upaya pemerintah untuk menerapkan prinsip pemulihan secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan masyarakat. Penyaluran bantuan berdasarkan kategori kerusakan mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Meskipun demikian, proses rehabilitasi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, pengawasan kualitas pembangunan, serta kebutuhan penerapan standar konstruksi tahan gempa pada bangunan yang direhabilitasi (Silviani et al., 2022).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas rehabilitasi tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, ketepatan sasaran, serta mekanisme pengawasan dalam setiap tahapan pelaksanaan. Penguatan koordinasi antarinstansi dan pengawasan terhadap mutu pembangunan menjadi faktor penting untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai standar keselamatan dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Strategi pascabencana seharusnya tidak berhenti pada pemulihan kondisi sebelum bencana, tetapi diarahkan pada peningkatan kapasitas wilayah agar lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa mendatang. Pendekatan *build back better* menjadi penting karena mampu mengintegrasikan rehabilitasi dengan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan sehingga hasil pembangunan memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya (Rahmawati, Ningsih, Sasmita, et al., 2025).

Penerapan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa proses rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada pemulihan kondisi sebelum bencana, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas tata kelola pembangunan, meningkatkan ketahanan infrastruktur, serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana yang akan datang. Analisis berdasarkan siyasah tanfiziyyah menunjukkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan manifestasi tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Pemulihan yang dilakukan secara transparan, proporsional, dan akuntabel mencerminkan pelaksanaan amanah negara dalam memenuhi hak masyarakat terdampak sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Edriani et al., 2020).

Selain mencerminkan prinsip amanah, proses rehabilitasi juga merepresentasikan prinsip keadilan melalui pemberian bantuan yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan serta prinsip kemaslahatan yang mengutamakan pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, strategi pascabencana yang dilaksanakan BPBD Kota Bengkulu tidak hanya memenuhi aspek administratif penyelenggaraan penanggulangan bencana, tetapi juga menunjukkan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang selaras dengan nilai-nilai siyasah tanfiziyyah dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat (Sudarman & Dudi, 2026).

Analisis Strategi BPBD Kota Bengkulu dalam Perspektif Siyasah Tanfiziyyah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi BPBD Kota Bengkulu pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip siyasah tanfiziyyah. Seluruh kebijakan yang diterapkan diarahkan untuk melindungi keselamatan masyarakat melalui mitigasi, respons cepat, serta rehabilitasi yang berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi eksekutif tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga mengandung dimensi etis dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rahmawati, Ningsih, Hanifah, et al., 2025).

Prinsip amanah tercermin melalui tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat sejak sebelum bencana hingga proses pemulihan selesai. Prinsip syura diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prinsip keadilan terlihat pada pemberian pelayanan dan bantuan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat terdampak, sedangkan prinsip kemaslahatan tercermin dari orientasi kebijakan yang mengutamakan keselamatan jiwa, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan kehidupan masyarakat (Fernalia et al., 2020).

Pelaksanaan strategi masih menunjukkan beberapa tantangan yang memerlukan penyempurnaan, terutama pada aspek pemerataan mitigasi, efektivitas koordinasi saat tanggap darurat, serta penguatan kualitas rehabilitasi pascabencana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, efektivitas implementasi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana (Fricillya et al., 2024).

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, strategi BPBD Kota Bengkulu telah merepresentasikan implementasi kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip siyasah tanfiziyyah melalui pengintegrasian aspek mitigasi, penanganan darurat, dan rehabilitasi dalam satu sistem penanggulangan bencana yang berorientasi pada perlindungan masyarakat. Optimalisasi kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi, serta peningkatan partisipasi publik menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan (Anggraini & Ernawati, 2017).

KESIMPULAN

Strategi penanggulangan gempa bumi yang dilaksanakan BPBD Kota Bengkulu telah mencakup tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana secara terpadu melalui kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, respons darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat terdampak. Implementasi strategi tersebut menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip siyasah tanfiziyyah, terutama amanah, syura, keadilan, dan kemaslahatan, sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dalam melindungi jiwa dan harta masyarakat. Meskipun demikian, optimalisasi efektivitas penanggulangan bencana masih memerlukan penguatan literasi kebencanaan, peningkatan partisipasi masyarakat, pengawasan rekonstruksi berbasis standar tahan gempa, serta penguatan koordinasi antarlembaga guna mewujudkan tata kelola kebencanaan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarabi, A., & Adhrianti, L. (2023). Strategi Komunikasi Resiko Bencana Bagi Upaya Penanggulangan Bencana Daerah (Studi Pemetaan Resiko Bencana di Kabupaten Bengkulu Tengah). *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 146–158.
- Anggraini, L. R., & Ernawati, E. P. P. (2017). PEMETAAN KAWASAN KECAMATAN RENTAN BENCANA GEMPA DI KOTA BENGKULU MENGGUNAKAN FUZZY TSUKAMOTO. *Jurnal Rekursif*, 5(3).
- Ariyanti, M. Y., & Susanti, A. (2025). STRATEGI HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MENSOSIALISASIKAN BAHAYA MEGATHRUST DI BANYUWANGI. *Interelasi Humaniora*, 1(5), 469–478.
- Edriani, A. F., Mase, L. Z., & Besperi, B. (2020). Sosialisasi Tanggap Darurat Dan Keselamatan Bagi Masyarakat Daerah Rawan Gempa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 64–71.
- Fernalia, F., Pawiliyah, P., Ellesse, V., Triana, N., Direja, A. H. S., Juksen, L., Listiana, D., & Rahmawati, I. (2020). Penyuluhan Dan Simulasi Management Disaster Di Madrasah Aliyah Negeri Model 01 Kota Bengkulu. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 170–177.
- Firmansyah, M. A., & Arwani, M. (2013). Identifikasi Kerangka Pengetahuan Masyarakat Nelayan di Kota Bengkulu Dalam Kesiapsiagaan Bencana Sebagai Basis Dalam Merumuskan Model Pneggelolaan Bencana: Sebagai Basis Dalam Merumuskan Model Pengelolaan Bencana. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 4(1), 57–64.
- Fricillya, W. A., Rosyadi, M. A., Abdan, K., Nufus, H., Fitrah, J., Kertalam, L. R. A., Putri, R. A., Janna, I. L. F., & Sami, M. A. (2024). KKN DESA SALUT UNRAM 2023: STRATEGI MITIGASI BENCANA GEMPA BUMI DAN KEKERINGAN DI DESA SALUT KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA. *Jurnal Wicara Desa*, 2(1), 157–163.
- Hamzah, A., Amri, M. R., Rozita, E., & Yunus, R. (2020). Penilaian Bangunan Sederhana di Kawasan Rawan Gempabumi: Studi Kasus di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 11(1), 13–21.
- Putra, A. A., & Rahmi, N. (2021). Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah dan Hukum Positif). *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(2), 69–80.
- Rahmawati, I., Ningsih, D. P. S., Hanifah, H., Sari, R. M. S., Anggraini, H., Oktarina, M., Mutiara, V. S., Rachmadiya, E. P., & Agustin, M. M. (2025). Kemah Bakti Mahasiswa STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu: Kolaborasi untuk Kehidupan Lebih Aman. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 32–40.
- Rahmawati, I., Ningsih, D. P. S., Sasmita, F. N., Anggraini, H., & Rachmadiya, E. P. (2025). Simulasi Pemasangan Tenda Pengungsian pada Kondisi Bencana Alam Kemah Bakti Mahasiswa (KBM). *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, 4(2), 78–86.
- Safitra, L., Yuliani, H., & Ayu, E. T. (2023). Penguatan Modal Sosial Keluarga dalam Kegiatan Mitigasi Bencana di Kelurahan Malabro Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *Jurnal Abdimas Serawai*, 3(3), 139–151.
- Setiawan, M. R., & Handoyo, P. (n.d.). Sosialisasi Penanggulangan Bencana Gempa Bumi oleh BPBD Kota Surabaya. *SOSIETAS*, 15(2), 140–147.
- Silviani, Y. E., Fitriani, D., Ningsih, D. A., Sari, R. M., & Fahriani, M. (2022). Sosialisasi Siaga Bencana Dalam Penanggulangan Kegawatdaruratan pada Ibu Hamil Beresiko di wilayah

- kerja Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu: Sosialisasi Siaga Bencana Dalam Penanggulangan Kegawatdaruratan pada Ibu Hamil Beresiko di wilayah kerja Puskesmas. *Abmar Metakarya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 39–43.
- Sudarman, D., & Dudi, N. (2026). PERAN STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI DAN RESPONS BENCANA DI KOTA PAREPARE. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 8(1), 28–34.
- Susmita, A. R., Darmawi, E., & Suri, E. W. (2023). Analisis Pendekatan Mitigasi Bencana Alam Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kota Bengkulu. *Masyarakat Demokrasi-Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(2), 9–18.
- Yuliani, H., Widarini, D. A., & Ayuh, E. T. (2024). Peran Advokasi Dan Komunikasi Dalam Program Kelurahan Tangguh Bencana Kota Bengkulu. *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 6(2), 185–196.